

URGENSI HERMENEUTIK POSKOLONIAL

I. Catatan Pendahuluan

Istilah poskolonialisme¹ di Indonesia semakin mendapat perhatian dan mempunyai pengaruh luas di wilayah kajian filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya.² Misalnya, Mudji Sutrisno SJ dan Hendar Putranto (ed.) buku, *Hermeneutika Pascakolonial*.³ Dalam studi politik, kebudayaan, kesusastraan, sejarah, dan agama para pemikir telah memanfaatkan poskolonialisme sebagai instrumen kerja ilmiah bagi disiplin ilmu mereka.

Dalam bidang teologi, poskolonialisme juga digunakan sebagai instrumen untuk merefleksikan tema-tema teologis, baik dalam studi biblis, teologi sistematis, maupun teologi praksis. Para teolog mulai merintis “*postcolonial theology*” poskolonialisme memberikan sumbangan tersendiri bagi studi teologi. Contoh, Cathrine Keller dalam pengantar karyanya, *Postcolonial Theologies*, mengatakan: Teologi Poskolonial membumikan teologi sebagai disiplin ilmu yang “terlibat”, sekaligus memperjelas keyakinan bahwa agama dan teologi mempunyai peran dan kekuatan penting bagi proses transformasi sosial.⁴

A. Pengalaman Hermeneutik Pra-Poskolonial

Cara saya melakukan interpretasi biblis selama ini yaitu: *Pertama*, memahami konteks teks kitab suci, mengungkapkan maknanya, lalu melihatnya dalam konteks kekinian (sekarang) yang relevan untuk diaplikasi. *Kedua*, menempatkan teks-teks biblis semata dalam kesakralan, akibatnya dalam melakukan interpretasi biblis cenderung menerima begitu saja apa yang dikatakan teks tanpa memberikan catatan “kritis” (bersikap *taken for granted*). *Ketiga*, metode pendekatan yang digunakan masih didominasi budaya *westernisasi* (tindakan pem-barat-an).⁵ Ketiga cara ini saya sebut sebagai pengalaman hermeneutik pra-poskolonial.

B. Persoalan Yang Muncul

Hermeneutik pra-poskolonial yang selama ini saya lakukan, membuat saya tidak maksimal dalam melakukan interpretasi biblis dan penerapan teks biblis. Hermeneutik pra-poskolonial mereduksi teks biblis dan konteks kita, karena terjebak dalam dominasi budaya

¹ Ada beberapa kata yang lazim digunakan untuk menerjemahkan term “*postcolonial*” di lingkungan komunitas Intelektual di Indonesia: Budi Susanto menggunakan istilah *postcolonial*, Mudji Sutrisno memakai pascakolonial, sementara beberapa penerbit yang menerjemahkan literatur-literatur postcolonial memakai kata poskolonial.

² Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (terj., Yogyakarta: Qalam, 2007), xxi.

³ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Hermeneutika Pascakolonial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

⁴ Cathrine Keller Cs (ed.), *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, (St. Louis: Chalice Press, 2004), xxi

⁵ Yusak B. Setiawan, *Postcolonial Hermeneutics, Poscolonial Studies and the Third World Context*, 2012, 2

westernisasi.⁶ Setelah saya belajar hermeneutik poskolonial, saya menyadari ketiga cara tersebut (bagian A di atas) masih sangat bersifat kolonial dan *hybrid*, belum merdeka dalam melakukan interpretasi biblis. Hal ini terjadi karena kesalahan metodologi dalam melakukan interpretasi biblis. Konsekuensinya, membuat *output* interpretasi itu masih bersifat kolonial yang berlanjut dalam penerapan (aplikasi) melahirkan model *new colonization*. Dengan kata lain melanggengkan *colonization system*.

C. Masalah Yang Dianalisis: Gender Structure (I Kor. 14:34-35; Ef. 5:22-23)

Issue gender structure merupakan persoalan yang sangat menarik. Masalah ini bukan saja menjadi diskursus dalam perspektif budaya, tetapi juga dalam perspektif agama, politik, sosial, seks dan lain sebagainya. Minusnya, dalam teks biblis I Korintus 14:34-35 dan Ef. 5:22-23, kedua ayat ini yang melanggengkan diskriminasi laki-laki dan perempuan. Dengan dukungan budaya beberapa daerah di Indonesia (Toraja misalnya) menyebabkan sangat lama dan *crucial* perdebatannya baru bisa diterima perempuan menjadi pejabat gerejawi (penatua, daken dan pendeta).

Di level budaya tertentu di Indonesia, masalah *gender structure* masih kuat dampaknya bagi perempuan. Terjadi dikotomi peran dan posisi perempuan di ruang domestik (rumah tangga) dan ruang publik. Di ruang publik misalnya, sistem kerja dan upah tidak terdistribusi dengan baik kepada perempuan. Dalam posisi dan peran politik ditandai masih adanya undang-undang politik yang hanya membatasi 30% bagi perempuan untuk masuk kandidat legislatif dan jabatan menteri pemberdayaan perempuan. Sesungguhnya kedua hal tersebut tanpa sadar telah melakukan justifikasi bahwa memang selama ini kaum perempuan diperdaya, sekaligus melanggengkan *gender structure* itu. Masalah *gender structure* ini, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan paradigma hermeneutik poskolonial.

II. Hermeneutik Poskolonial

A. Defenisi Poskolonial

Mendefinisikan istilah postkolonialisme sama sukarnya mendefinisikan istilah postmodern. Hal ini terkait dengan adanya prefik '*post*' yang mana pada ranah selanjutnya akan mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: *pertama*, basis epistemologis, apakah post kolonialisme adalah revolusi dari dekontruksi terhadap kolonialisme? *Kedua*, rentetan

⁶ Ibid, 2

waktu, apakah post kolonialisme merupakan kelanjutan kolonialisme? Akan tetapi kebanyakan pakar studi postkolonialisme lebih menekankan pada pengertian pertama, “lebih baik memikirkan postkolonialisme bukan sebagai sesuatu yang datang setelah kolonialisme dan menandakan kematian kolonialisme, tetapi secara lebih longgar dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisan-warisan kolonialisme.”⁷ Sebagai suatu subyektivitas dari perlawanan terhadap wacana-wacana dan praktik-praktik imprealisasi dan kolonialisasi.⁸

Banyak orang salah pengertian ketika mengasosiasikan term ‘post’kolonial dengan berakhirnya era kolonialisme. Kata “*post*” bukan pertama-tama berkaitan dengan periode atau masa setelah kolonial, tetapi lebih menunjuk pada pengertian “melampaui” kolonial. Cathrine Keller, menegaskan, “‘*Post*’ in this discourse never means simply ‘after’ but also ‘beyond’- as an ethical intention and direction”.⁹ Poskolonial mencakup dimensi temporal (*what follows- the-colonial*) dan juga aplikasi kritis (apa saja yang mempertanyakan “*the colonial*”). Bagi Keller term “*post*” dalam poskolonial menunjuk pada, (1) “*The ‘period of time following the formal separation or ‘independence’ of a ‘colony’ or group of colonies from a governing ‘empire’*”, dan (2) “*A critical idea, and so indicates the intention to go beyond the colonial in all its forms*. Karena itu Catherine Keller mendefinisikan, “*postcolonialism is a discourse of resistance to any subsequent related projects of dominance*”.¹⁰

Menurut R.S Sugirtharajah, term poskolonial memuat sekurang-kurangnya tiga arti: 1) Dalam tataran historis, poskolonial memuat kondisi-kondisi sosial, kultural, politis dari tata dunia dewasa ini, mengemukakan fakta-fakta kolonialisme budaya, politik dan ekonomi, dan menambahkan pengakuan akan ambiguitas dekolonisasi dan neokolonisasi yang terus berlangsung; 2) Sebagai bentuk wacana kritis, poskolonial telah memelopori analisis teks dan masyarakat. Ia menyuguhkan bacaan-bacaan oposisional, menyibak suara-suara yang tertekan. Ia tidak sekedar menginterogasi dominasi kolonial tetapi memberikan alternatif kritis; 3) Istilah itu juga mengimplikasikan posisi ideologis atau politis dari penafsir yg terlibat dalam teori dan praktek anti-kolonial dan anti globalisasi. Jika diterapkan dalam studi biblis, ia berusaha untuk membuka desain-desain kolonial baik dalam teks-teks biblis dan penafsirannya, dan berusaha untuk membaca teks dari *concern* poskolonial seperti identitas,

⁷ Ania Loomba, *kolonialisme/pascakolonialisme*, terj. Hartono Hadikusumo, (yogyakarta, bentang budaya, 2003), 7

⁸ Ibid, 8

⁹ Cathrine Keller Cs (ed.), *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, (St. Louis: Chalice Press, 2004), 6

¹⁰ Ibid, 7

hibriditas, dan diaspora.¹¹ Sugirtharajah mengajukan definisi poskolonialisme sebagai berikut:

Postcolonialism is not simply a physical expulsion of imperial power. Nor is it simply recounting the evils of the empire, and drawing a contrast with the nobility and virtues of natives and their culture. Rather, it is an active interrogation of the hegemonic systems of thought, textual codes, and symbolic practices which the West constructed in its domination of colonial subjects. In other words, postcolonialism is concerned with the question of cultural and discursive domination.¹²

B. Analisis Terhadap Gender Structure Dalam Budaya Indonesia

Gender structure dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa factor: adat dan budaya (*patriarchal culture*), hukum (undang-undang dan sistem politik), sebagian karena pengaruh teks biblis serta lembaga agama. Misalnya, dalam I Kor. 14:34-35 dan Ef. 5:22-23 menunjukkan kuatnya pengaruh *gender structure* Israel (Timur Tengah) mempengaruhi penulisan teks biblis. Begitu masifnya budaya *gender structure* itu terjadi sehingga Allah pun diberi gelar Bapa. Kosekuensi logis dari *patriarchal culture* dan *gender structure* melahirkan ketidakadilan baik dalam peran dan posisi sosial, ekonomi, politik, seks dan sebagainya.

Issue gender structure menjadi isu yang menarik didiskusikan, karena isunya sendiri tidak tunggal masalah *gender*, tetapi berhubungan dengan isu perempuan, seks, *culture*, *politic*, *economy* dan sebagainya (sangat multidisiplin). Pendekatan poskolonial sangat membantu untuk mendiskusikan persoalan *gender structure* secara proporsional dan setara. Penting sekali mendudukan persoalan ini secara proporsional sebab ada gejala radikal dari gerakan feminis mempersalahkan kaum laki-laki sepenuhnya, dituduh menindas perempuan dan penikmat dari *patriarchal culture* dan *gender structure* tanpa berusaha memahami dengan arif dan bijaksana bahwa dalam sistem *patriarchal culture* sesungguhnya laki-laki jauh lebih mengalami penindasan akibat *interconnecting system* dan *interlocalling system*. Sistem *patriarchal culture* itu sendiri memaksa dan menindas laki-laki untuk melakukan kekerasan.¹³ Dalam batas tertentu, karena persoalan ekonomi, tren pergaulan dan seks, perempuan pun bisa memaksa dan menindas laki-laki. *Postcolonial studies* memberikan analisis bahwa *patriarchal culture* dan *gender structure* dampak ketidakadilannya tidak hanya terhadap perempuan tetapi laki-laki pun menjadi korban. System itu sendiri sangat menindas laki-laki. Ini menunjukkan fenomena *global impair*.

¹¹ Yusak B. Setiawan, *Postcolonial Hermeneutics, Countours of Postcolonial Studies*, 2012, 2-3

¹² R.S. Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, (St. Louis, MO: Chalice Press, 2003), 15

¹³ Catatan kuliah *Hermeneutik Poskolonial* dari Yusak B. Setiawan, UKSW, tgl 1 Juni 2012

Postcolonial studies membantu menganalisis persoalan *gender structure* secara jernih dalam kesetaraan kemanusiaan. Pendekatan postkolonial menawarkan kemungkinan untuk mendekolonisasi penaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia. Misalnya, di beberapa gereja telah terbuka untuk menerima perempuan menempati peran dan posisi jabatan gerejawi (penatua, diaken dan pendeta) walaupun disadari, mungkin saja masih ada gereja yang masih tertutup untuk itu. Dalam pengaturan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan di ruang domestik dan ruang publik mulai terasa terdistribusi dengan baik. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif pendekatan poskolonial memungkinkan teolog Indonesia untuk melawan hegemoni barat.

C. Urgensi Studi Hermeneutik Poskolonial

Postcolonial sebagai "counter knowledges" bermula dari revolusi kesadaran, poskolonial lahir untuk menggugat konstruksi kolonial yang telah menindas kelompok-kelompok marjinal. Poskolonial kemudian membongkar (dekonstruksi) kembali wacana-wacana yang terstruktur, termasuk dalam memetakan politik dan kekuasaan. Poskolonial juga dimaksudkan sebagai alat kritik yang melihat secara jernih bagaimana simbol-simbol kebudayaan digerakkan dalam struktur masyarakat untuk kepentingan kelas tertentu.

Postkolonial ingin membongkar persemayaman mitos, sebab mitos selalu mengajak kita untuk berfantasi dan inilah yang terus menerus di produksi kolonialisme baru baik kolonialis lokal maupun interlokal. Poskolonial mengingatkan agar tak mudah menerima pemikiran yang suka melestarikan sesuatu dari masa silam. Sebab bagaimanapun nostalgia yang dikonsumsi secara berlebihan sangat membahayakan, selain akan menumpulkan kesadaran kritis, nostalgia akan melepaskan tanggung jawab diri dari tugas yang seharusnya diemban dalam kolase kehidupan ini. Poskolonial melakukan itu semua bukan sebagai propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tapi dalam arena dialektika yang lebih subtil yakni kesadaran. Bagi kaum postkolonialis, perubahan bermakna memang bermula dari gagasan (wacana), melakukan dekonstruksi yang mengagetkan kaum kolonialisme dengan membawa slogan "kesadaran tandingan". Karena itu, sampai kapanpun hermeneutik poskolonial tetap menjadi kebutuhan yang urgen.

III. Catatan Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

- Kurang maksimalnya interpretasi biblis selama ini karena kesalahan metode pendekatan dalam melakukan interpretasi, akibatnya interpretasi yang dihasilkan bisa menjadi kolonisasi baru. Karena itulah hermeneutik poskolonial memerdekakan kita dalam melakukan interpretasi dan memberikan suguhan analisis yang sangat kritis terhadap berbagai persoalan yang sangat *complicated*.
- Persoalan *patriarchal culture* dan *gender structure* dalam masyarakat bukanlah merupakan masalah yang murni masalah *gender*, tetapi *interconnecting* dengan masalah ekonomi, politik, agama, budaya, kerja, psikologi dan sebagainya. Kolonisasi terjadi bukan hanya karena kekuatan politik, tetapi juga karena dominasi dan hegemoni ekonomi, agama, budaya, rasial, gender dan sebagainya. Ini menunjukkan fenomena *global impair* dan di dalamnya kita hidup. Faktor apapun yang melanggengkan *patriarchal culture* dan *gender structure* mesti dikonstruksi ulang dalam kesetaraan humanitas laki-laki dan perempuan.
- *patriarchal culture* dan *gender structure* yang dirasa tidak adil oleh kaum perempuan, sesungguhnya harus disadari bahwa ada banyak yang diakibatkan oleh sesama perempuan sendiri.
- Masa depan keadilan adalah menjadi satu tanpa ***gender structure***, meskipun hal ini mustahil. Hal ini dapat terwujud jika dimulai dari dalam keluarga. Keluarga mesti dijadikan sekolah pertama untuk keadilan dan moral.

B. Refleksi

Yang perlu dikritisi secara serius yaitu kebijakan lembaga agama bisa memajukan tetapi bisa pula jadi penghambat melakukan rekonstruksi *gender structure*, ini terjadi karena pengaruh teks-teks kitab suci agama. Dalam konteks Indonesia, ini menunjukkan bahwa orang Kristen di Indonesia masih mengalami kolonisasi Barat; orang Islam di Indonesia masih mengalami kolonisasi Arab; serta orang Budha dan Hindu masih mengalami kolonisasi India. Oleh sebab itu Soekarno pernah mengatakan: “kalau jadi orang Kristen di Indonesia, maka jangan jadi orang Yahudi; kalau jadi orang Islam di Indonesia, maka jangan jadi orang Arab; dan kalau jadi orang Hindu di Indonesia, maka jangan jadi orang India.”

Karena itu, agar umat beragama menikmati kemerdekaannya dalam beragama dan dalam rangka mengembangkan teologia yang mumpuni, maka inilah yang menjadi alasan

urgensi melakukan hermeneutik poskolonial. Hermeneutik poskolonial merupakan salah satu metode pendekatan yang dapat membantu warga jemaat dalam mengembangkan tafsir kitab suci secara *just* dan *equal* tanpa *gender structure*.

Daftar Pustaka

A. Makalah

Setyawan, Yusak B., *Postcolonial Hermeneutics, Countours of Postcolonial Studies, Draft 1* - 4, 2012

B. Buku

Gandhi, Leela, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (terj.), Yogyakarta: Qalam, 2007.

Keller, Catherine Cs (ed.), *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2004

Loomba, Ania, *kolonialisme/ pascakolonialisme*, terj.hartono hadikusumo, yogyakarta, bentang budaya, 2003.cet 1

M Dahlan, Muhidin dkk, *postcolonial sikap kita terhadap imprevialisme*, yogyakarta, jendela grafika, 2001. Cet 1

Sugirtharajah, R.S., *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (ed.), *Hermeneutika Pascakolonial*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.